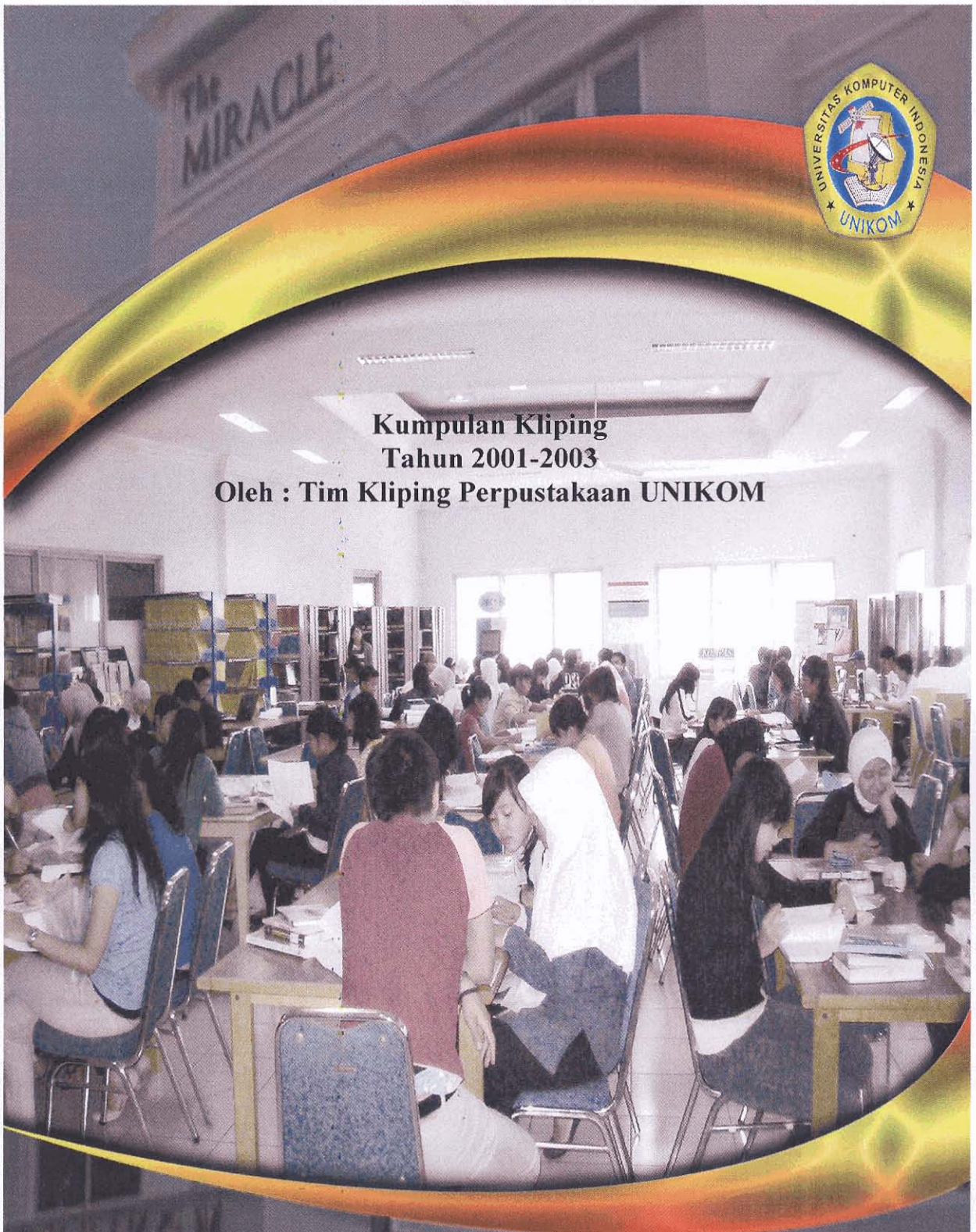


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1-2
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO · CLASS : GURU / 370.7

Memprihatinkan, Nasib Para Guru

JAKARTA, KOMPAS — Nasib para guru yang masih memprihatinkan serta dedikasi mereka yang besar, Minggu (16/6) malam, diperbincangkan dalam peringatan ulang tahun ke-70 Prof Dr HAR Tilaar di Gedung Arsip Nasional, Jakarta. Kenyataan tersebut semakin bermakna karena sekarang tampak perbedaan antara pengajaran dan pendidikan, padahal guru yang baik seharusnya akan mampu memadukan keduanya.



DOK KELUARGA

HAR Tilaar

Pada acara peringatan yang berlangsung amat meriah tersebut diluncurkan dua buku terbaru karya Prof Tilaar, *Membenah Pendidikan Nasional* dan *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Selain itu, juga diterbitkan kumpulan tulisan dari 36 sahabat Prof Tilaar untuk ikut menandai peringatan 70 tahun usia yang bersangkutan. Buku ketiga terbit dalam judul *Pendidikan untuk Masyarakat Baru Indonesia*.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Abdul Malik Fadjar secara terus terang melukiskan rasa terkejutnya ketika belum lama ini tanpa sengaja menengok jaminan kesejahteraan guru di sebuah sekolah swasta, tidak jauh dari Jakarta. "Imbalan mereka ternyata hanya Rp 150.000 per bulan. Saya semakin tambah prihatin, tetapi sekaligus bangga, ketika menyaksikan para guru tersebut tetap tekun menunggui ebtanas, meskipun mereka makan siang hanya dengan sepotong krupuk," katanya.

Pada bagian lain, Mendiknas menegaskan bahwa sepanjang zaman pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin jika masyarakat memiliki pendidikan secara memadai, sehingga mampu memelihara serta melestarikan lingkungan. Tetapi, masalah pendidikan diakui oleh Mendiknas memang sangat kompleks. Oleh karena itu, Malik berjanji akan selalu terbuka dalam menerima gagasan inovatif dalam meningkatkan demokratisasi sistem pendidikan nasional dan peningkatan mutu belajar-mengajar.

Bukan tukang

Sesudah memuji Prof Tilaar sebagai guru yang baik, sebab di masa usia lanjut masih terus menyumbangkan buah pikirannya demi kemajuan dunia pendidikan, Jakob Oetama yang dulunya juga seorang guru mengatakan, "Pengalaman saya, guru yang memenuhi persyaratan lengkap sebagai guru adalah mereka yang mau dan mampu menyatukan pendidikan dan pengajaran pada dirinya. Semua mata pelajaran menjadi bahan pendidikan. Lewat pendidikan dibangun sosok pribadi yang semakin sanggup mencerna mata pelajaran."

Lebih lanjut Jakob menegaskan, seorang guru bukan tukang—apalagi mesin—karena mereka adalah pendidik. Guru bukan sekadar mengajarkan tentang berbagai macam mata pelajaran, melainkan juga mendidik dengan memberikan budi pekerti, agama serta membentuk watak serta kepribadian murid-muridnya.

Dalam kaitan ini, tanpa mengurangi arti penting sistem pendidikan berikut kesiapan lembaga serta perangkatnya, Jakob Oetama mengatakan, "Barangkali mempersiapkan serta mendidik guru merupakan agenda yang sepantasnya memerlukan perhatian sentral."

Tampil membacakan doa pada acara tersebut, seorang bekas guru, Pater Drost SJ. Perbincangan mengenai dunia pendidikan malam itu juga menghadirkan Prof Dr Max Makagiansar dan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Sutjipto.

Tilaar, ahli pendidikan kelahiran Tondano (Sulut), telah menghasilkan tidak kurang dari sepuluh buku. Setelah lulus dari Universitas Indonesia tahun 1961, dia mengambil program master di University of Chicago (AS) dan meraih doktor pendidikan dari Indiana University, AS. Akan tetapi, nama dan prestasinya seolah-olah 'tenggelam' dalam bayang-bayang istrinya, Martha, produsen kosmetika terkenal. (JUP)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 12 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 0 / 1-4
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : ARIYANTO, TOTOK, Drs.
Subjek : PENDIDIKAN AGAMA / 377

Mengakhiri Hipokrisi Pendidikan Agama

Wtidak menyam[pai]kan solusi yang operasional bagi revolusi pendidikan agama, namun sebagai akad[e]misi Nurudin telah berani menyingkap tabir kemunafikan (hipokrisi) penyelenggaraan pendidikan agama selama ini (*Kompas*, 3-6-2002).

Out put dari penyelenggaraan pendidikan agama yang hipokrit ini, antara lain, disebutkan: banyak orang yang beramai-ramai ke masjid, gereja, pura dan tempat ibadah lain atau rajin beramal hanya biar dianggap tahu ajaran agamanya atau tidak dianggap sekuler. Kepekaan orang-orang beragama hanya muncul ketika menjumpai penyimpangan formal keagamaan, namun tetap buta pada penyelewengan sosial kemanusiaan.

Penyelenggaraan pendidikan agama yang hipokrit—lalu menghasilkan masyarakat hipokrit pula, menurut pencermatan penulis—tidak terlepas dari pola pembelajaran atau pendekatan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Menurut Richard Martin, paling tidak ada dua macam pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan (studi) agama, yaitu: (1) pendekatan yang bersifat tekstualis, literalis dan skripturalis sehingga menghasilkan seorang *believer* (*muk-min*), dan (2) pendekatan yang bersifat obyektif, positivistik dan realistik untuk dapat menghasilkan seorang historian atau *muarrikh*.

Jika menggunakan pendekatan yang tekstualis, literalis dan skripturalis, dalam menjelaskan dimensi-dimensi keagamaan pembelajaran pendidikan agama lebih menitikberatkan pada kebenaran doktrinal dan dogmatis. Hanya menekankan keunggulan-keunggulan dari sistem nilai, otensitas teks-teks keagamaan serta absolutisme ajaran-ajaran agamanya sendiri.

Sementara pada tataran praksis, pendekatan ini banyak menggunakan cara-cara yang bersifat [redacted] persuasif-apologe[redacted]. Artinya, di satu sisi ia lebih kerap menonjolkan keunggulan dan kelebihan agamanya sendiri, disisi lain selalu mengorek kelemahan dan mendiskreditkan kekurangan agama lain.

◆◆◆

SEJAUH pengamatan penulis, pendekatan pendidikan agama semacam inilah yang selama ini mendominasi penyelenggaraan pendidikan agama di ruang-ruang kelas, mulai dari tingkat SD (bahkan dari TK) hingga ke perguruan tinggi. Alhasil, *out put* yang diperoleh berupa orang-orang "percaya" yang cenderung menangkap ayat-ayat suci secara sempit dan kaku. Pemikir[redacted]an dan penghayatan [redacted]as ajaran agama [redacted]rsifat normatif, [redacted]gmatis, doktriner [redacted]n isolatif.

Klaim kebenaran agama (*truth claim*) [redacted]ng berlebihan mendasari setiap perilakunya. Dalam hidup bermasyarakat, orang-orang seperti ini cenderung bersikap eksklusif, primodialistik, bahkan kompulsif, yaitu keniscayaan yang tak tertahankan untuk mewujudkan suatu kehendak atau nafsu (yang mengatasnamakan agama) dengan menggunakan cara-cara apa pun.

Maka, sudah saatnya pola pembelajaran agama yang demikian ini segera diakhiri, digantikan dengan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralis, yaitu melalui pendekatan yang obyektif, positivistik dan realistik.

Pola pendekatan ini diselenggarakan untuk mengurai secara luas dan komprehensif tentang berbagai aspek keagamaan, seperti sejarah, sistem nilai, struktur religi dan doktrinnya serta kontribusinya bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sama sekali tidak melibatkan diri pada persoalan menyalahkan dan membenarkan (*value judgement*) keagamaan.

Pada tingkat praksis, pendekatan ini tidak lagi berkutat pada pola pembelajaran ayat-ayat suci dan kewahyuan secara tekstual-literalis, melainkan lebih menekankan pada pemahaman kontekstual sambil mengangkat dan menggali kembali segi-segi "historis eskegetis" dari teks-teks kitab suci.

Dengan menggunakan pendekatan obyektif, positivistik dan realistik ini, orientasi pendidikan agama tidak lagi diarahkan pada upaya pencarian kelemahan dan perbedaan suatu agama. Tetapi, lebih dititikberatkan pada upaya pembentukan sikap apresitif positif terhadap agama lain, seraya tetap mempertahankan sikap otokritik dan introspeksi kreatif terhadap agamanya sendiri.

Kiranya, melalui pendekatan yang demikian ini praktik pendidikan agama yang hanya menghasilkan masyarakat hipokrit dapat segera diakhiri. Pendekatan pendidikan agama semacam ini akan dapat membawa pola pemikiran, pemahaman atau penghayatan keimanan seseorang menuju ke corak kehidupan beragama yang inklusif, toleran, dialogis dan kooperatif. Semua itu memang dibutuhkan untuk meningkatkan kohesivitas masyarakat Indonesia yang multi-religi.

DRS TOTOK ARIYANTO
Praktisi dan pemerhati pendidikan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 16 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 5-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SAPARI, ACHMAD
Subjek 1KLASS : PENDIDIKAN ASOSIASI 370.19

Kegamangan Guru di Era Otonomi Sekolah

ERA otonomi pendidikan yang berimplikasi pada *otonomi sekolah*, tampaknya tidak berjalan secara linier sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, banyak batu sandungan dan kendala yang menghadang. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas guru, khususnya guru SD/madrasah ibtidaiyah (MI).

Di tengah bergulirnya program otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bermuara pada otonomi sekolah, tidak jarang guru masih *merasa gamang* dengan inovasi pendidikan. Mereka seolah-olah berada pada lorong gelap yang di sekelilingnya tidak ada cahaya sedikit pun. Karena itu mereka meraba-raba dan berbuat sesuatu menurut naluri, bukan menurut kehendak profesionalismenya.

Para birokrat pendidikan di pusat dan daerah barangkali tidak menduga bahwa kebijakan pendidikan yang diambilnya akan memiliki dampak yang *sangat besar terhadap* profesionalisme guru. Sebut saja soal MBS, ujian akhir sekolah (UAS), penerimaan siswa baru di SLTP/SMU, dan sebagainya. Semuanya seolah-olah bola salju yang dapat begitu saja digelindingkan. Padahal, jika kita melihat realitas di lapangan, kita akan menemukan sebuah fenomena yang *memprihatinkan*. Mengapa hal itu terjadi?

Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah karena kurangnya sosialisasi terhadap guru sebagai agen perubahan atau garda depan pendidikan. Padahal, kunci utama kesuksesan program yang diluncurkan terletak pada siap atau tidaknya guru sebagai garda depan pendidikan.

◆◆◆

HASIL pengamatan sementara di lapangan menunjukkan, banyak *guru yang merasa* "asing" dengan inovasi pendidikan yang sedang berkembang dewasa ini. Sebutlah tentang MBS, UAS, kurikulum berbasis kompetensi, dan sebagainya. Pemahaman mereka terhadap inovasi pendidikan tersebut hanya sepotong-potong. Mereka bahkan ada yang sama sekali tidak memahami secara substansial apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

Jika kualitas guru semacam itu, bagaimana mungkin gagasan pengembangan kurikulum oleh sekolah—sebagaimana digulirkan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas Indra Djati Sidi—akan benar-benar dapat dilaksanakan oleh guru? Bagaimana mungkin guru dapat mengembangkan MBS dan kurikulum berbasis kompetensi dan *life skills*? Oleh karena itu, prioritas utama adalah bagaimana informasi mengenai inovasi pendidikan benar-benar dapat ditangkap secara benar oleh guru, sebab merekalah *yang akan me*ngembangkan inovasi pendidikan tersebut.

Di tengah upaya pemerintah mengembangkan berbagai inovasi pendidikan, tidak sedikit guru yang memiliki pemikiran apatis dan sempit. Mereka sering terjebak pada pola pikir dan paradigma yang mengarah pada "pemiskinan diri", *baik di bidang in*formasi maupun pengembangan. Mereka enggan untuk menerima sesuatu yang baru dan cenderung bersikap acuh tak acuh.

Melihat realitas yang demikian, maka fungsi kepala sekolah di dalam menggerakkan guru sangat penting. Kepala sekolah di masa depan haruslah mampu menjembatani kebutuhan guru, terutama di bidang inovasi pendidikan. Dengan demikian, diharapkan sekolah sebagai *organisasi ha*rus dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, sekaligus memenuhi kapasitas manajemen pendidikan (Hardjosoedarmo, 1997) dengan karakteristik: (1) bergerak secara lebih efektif atas dasar misinya, (2) selalu berusaha memenuhi harapan masyarakat, (3) kegiatannya bersifat pro-aktif, (4) mengejar daya saing, (5) anggotanya lebih tekun bekerja, (6) anggotanya harus lebih giat berusaha, (7) pemimpinnya mau mengerahkan seluruh anggota dengan pemberdayaan, (8) pemimpinnya mendorong anggota untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kecakapan supaya *mutakhir dan relevan dengan* tugas, dan (9) perencanaannya terpadu, pelaksanaan dan pengendalian terdesentralisasi.

Dari peran yang dimainkan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan birokrat pendidikan yang terkait, maka perlahan-lahan tetapi pasti guru akan bertumbuh jabatannya dan mereka akan mengubah paradigma pemikirannya. Perubahan paradigma pemikiran guru tentu tidak dapat berlangsung sesaat. Harus ada upaya *yang terus-menerus untuk me*ngembangkan profesi guru. Salah satunya adalah bagaimana memberikan kesempatan yang leluasa kepada guru untuk tumbuh dan berkembang.

Jika guru sudah benar-benar mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, maka kegamangan yang selama ini muncul sebagai akibat dari kurangnya peran guru di dalam mengembangkan inovasi pendidikan akan benar-benar *dapat diminimalisasi. Paling* tidak, guru akan termotivasi untuk selalu mengembangkan profesionalismenya.

ACHMAD SAPARI
Pengawas TK/SD di Probolinggo

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 19 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SULASTRI
Subjek : PENDIDIKAN / 373

Menjelang Ujian Masuk PTN Perlukah Ikut Bimbingan Belajar?

TAHUN lalu seorang pelajar sekolah menengah umum (SMU) kelas tiga di Jakarta mengikuti bimbingan belajar di sebuah lembaga bimbingan belajar (LBB). Ia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Begitu besar keinginannya sampai ia merasa tak cukup hanya belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal di rumah, melainkan mau bersusah payah belajar sangat intensif di LBB.

SETIAP hari, selain di SMU ia harus masuk "sekolah" LBB di sore hari. Sebulan terakhir, menjelang tes ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN—sekarang menjadi sistem penerimaan mahasiswa baru, SPMB) di tempatnya belajar ia di-*drill* dengan soal-soal bidang ilmu pengetahuan alam, sesuai program studi yang hendak ia pilih.

Suatu kali LBB tersebut mengadakan *try out* (uji coba) UMPTN. Skor yang ia peroleh 65, sebuah hasil yang bagus. Tenaga tutor di LBB-nya menyatakan, dengan skor itu ia dijamin bisa lolos seleksi masuk FKUI. Tentu saja, saat mengisi formulir pendaftaran ia merasa sangat yakin, sehingga ngotot menuliskan FKUI sebagai pilihan pertama. Tak didengarnya saran orangtua.

"Saya bilang jangan percaya dengan janji LBB-nya, tetapi dia ngotot dan benar-benar percaya. Saran kami agar ia tak memilih UI, tak diterima. Sebagai gantinya, saya suruh dia pilih FK di universitas lain daripada ia kecewa berat," cerita Prof Dr Soesmalijah Soewondo, guru besar di UI yang tak lain adalah tante siswa tadi. Benar saja, hasil UMPTN 2001 menyatakan ia tak lolos masuk FKUI, tetapi masih beruntung diterima di pilihan kedua.

Itu salah satu cerita mengenai sepak terjang salah satu LBB yang mungkin karena makin ketatnya persaingan merebut pasar, makin berani memproklamirkan diri memberi jaminan kepada kliennya.

Cara lain—masih dalam upaya merebut calon siswa sebanyak-banyaknya—ditempuh sebuah LBB cukup ternama di Jakarta dengan cara memasang foto Prof Dr Toemin, ahli statistik UI yang juga jadi penjaga gawang urusan komputer pada Panitia Pusat SPMB. Foto ramai-ramai dengan pemilik LBB tersebut dipajang di bagian depan kantor lembaga tersebut. Tak sengaja, keponakannya yang akan mendaftar ke PTN ikut kursus di LBB tersebut. "Wah foto Pak De (Paman) ada di LBB tempat saya kursus," ujar Toemin menuturkan kembali ucapan keponakannya.

Tentu saja Toemin terkejut. "Saya tidak kenal dengan orang LBB mana pun, termasuk yang di dalam foto itu," katanya, pekan lalu.

Berbagai cara ditempuh pengelola LBB untuk menarik calon siswa. Apalagi mendekati masa kelulusan siswa SLTA, makin gencar saja promosi yang dilakukan. Mulai dari menyebar brosur yang memuat jumlah siswa tahun tertentu yang diterima pada beberapa PTN di Indonesia, memberi jaminan dengan pencapaian skor tertentu pasti bisa lolos di program studi tertentu, hingga memajang foto orang yang diketahui duduk di kepanitiaan SPMB.

Ya, masuk LBB—para pelajar menyebutnya bimbel (bimbingan belajar)—memang menjadi tren sejak pertengahan tahun 1990-an. Dari zaman sebelum tahun 1990, saat Bimbingan Belajar Siky Mulyono mulai dikenal karena begitu agresif memperkenalkan lembaganya sebagai tempat bimbingan belajar yang berhasil membawa peserta kursus masuk PTN terkemuka di Indonesia, promosi yang dilakukan memang luar biasa. Pengelola bisnis kursus pelajaran sekolah tersebut tahu benar masalah yang satu ini— mulai dari tak *pede* (percaya diri)-nya para orangtua terhadap pembelajaran di sekolah.

Mereka lantas menawarkan kursus untuk siswa kelas III sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan masa belajar selama sebulan (paket intensif), lama-lama berkembang menjadi paket setahun (reguler) bagi siswa yang baru naik ke kelas III SLTA. Tahun berikutnya malah dibuka kursus untuk siswa kelas VI sekolah dasar (SD) dan siswa kelas III sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)

selama setahun. Uang kursusnya bervariasi, tetapi berkisar pada angka Rp 375.000 (untu[k] program intensif sebulan) da[n] Rp 1.200.000 (untuk progra[m] setahun), termasuk diktat.

Program paket setahun mengajak siswa mendalami materi pelajaran yang ia terima di sekolah, ditambah variasi soal dari pihak LBB. Tujuannya, agar nilai rapor tiap catur wulan dan ujian (dulu ebtanas, kini ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional) bagus. Sementara paket intensif selama sebulan untuk siswa SLTA yang diatur masuk setiap hari dengan lama belajar dua jam, selain untuk melatih siswa mengerjakan beragam soal (dengan cara *drill*), juga untuk meningkatkan kemampuan akademis siswa. Tujuan terakhir menjadi hal penting bagi mereka untuk tes masuk PTN yang memang bertujuan mengukur kemampuan calon mahasiswa.

◆◆◆

BENARKAH peran LBB begitu besar dalam mengasah kemampuan anak terutama agar lolos ujian masuk PTN? Bagaimana dengan janji peserta pasti lulus tes jika ia mampu mencapai skor tertentu saat *try out*?

Prof Dr Soesmalijah Soewondo dengan nada keras berkata, "*It's not true*. Bohong jika mereka sampai memberikan jaminan semacam itu." Prof Toemin secara tegas juga menyatakan tidak setuju dengan iming-iming seperti itu. "Saya tak percaya sistem *drill* di bimbingan belajar, biarpun setahun penuh akan meningkatkan kemampuan siswa sehingga sukses mengerjakan soal UMPTN," kata mahaguru U[I] tersebut. Menurut dia, kemampuan memahami persoalan tak akan terasah dengan cara *drill* baik itu yang diadakan di sekolah-sekolah tertentu (biasanya unggulan) maupun di LBB.

Ucapannya didasarkan, antara lain, pada pengamatannya atas ratusan ribu peserta UMPTN pada kurun waktu 1990 hingga 2000. Secara khusus ia mengamati pergerakan hasil UMPTN tahun 1994-1997. Dari data para peserta UMPTN terlihat tak ada lonjakan prestasi yang berarti. Maksudnya, kalau benar ikut LBB bisa menaikkan prestasi, meningkatkan kemampuan mengerjakan soal-soal UMPTN, prestasi itu pasti kelihatan menonjol, tetapi dalam kurva yang dibuatnya ternyata semua datar saja.

"Jika sistem *drill* bisa membantu meningkatkan prestasi, pasti ada lonjakan di antara peserta UMPTN. Nyatanya, semuanya datar saja," lanjutnya seraya menggambarkan kurva yang ia maksud.

Syamto Hendro, Koordinator LBB Primagama Wilayah Jabotabek dan Banten mengakui bahwa peran LBB sekadar membantu siswa dari segi teknis, akademis, dan psikologi ketika maju ke UMPTN (SPMB). "Saya pastikan, kamu tak berani memberikan jaminan seperti itu," katanya. Dari banyak pengalaman diperoleh masukan, peserta tak lolos UMPTN bisa jadi bukan karena yang bersangkutan bodoh. Penyebabnya ternyata justru bisa di luar itu, misalnya pemakaian jenis pensil yang kurang tepat sehingga tak direspon dengan baik oleh komputer yang memeriksa lembar jawaban. Atau terjadi kesalahan saat mengisi formulir pendaftaran. Hal seperti itulah yang dibenahi.

"Karena namanya agak panjang sementara *form* di lembar komputer hanya 20 karakter, ia harus menyingkat namanya. Kalau di *form* pendaftaran dan lembar jawaban beda, identifikasi oleh komputer pun tak sama," jelas Hendro. Persoalan lain, sebagaimana juga diungkapkan Asep Rusmana Dewanto, Koordinator Kelulusan Siswa (K2S) Sony Sugema College (SSC) Bandung, soal strategi memilih jurusan sesuai kemampuan. "Ini perlu arahan dan strategi sehingga diharapkan pilihan siswa tak salah," tutur Asep.

Dua LBB tersebut memiliki pelayanan pemberian konsultasi kepada siswanya untuk memilih program studi yang hendak diambil. "Bagi peserta program setahun, ada *try out* dan konsultasi sebanyak tiga kali. Orangtua dilibatkan minimal dalam bentuk persetujuan atas pilihan jurusan oleh anaknya," kata Hendro.

Dari segi akademis, diakui Hendro, untuk program reguler setahun masih ada unsur teori diberikan kepada siswa selain menjawab soal. Sebaliknya sistem *drill* total dilakukan atas program intensif. Selain memberikan soal-soal UMPTN tahun sebelumnya, Primagama yang berpusat di Yogyakarta itu juga memberikan soal yang dibuat sendiri oleh timnya. LBB itu memberikan pula cara menjawab soal. Umpamanya saran agar mendahulukan mengerjakan soal paling mudah dan bagaimana mengerjakan soal secara cepat. "Kami menamakannya sebagai *smart solution*," lanjut Hendro.

Hampir senada dengan Hendro, pihak Sony Sugema College (SSC) juga mengaku tak berperan sangat besar dalam keberhasilan siswa. "Tak ada janji atau jaminan pasti diterima di jurusan X PTN A jika ia mencapai skor tertentu saat *try out*," aku Asep. Pihaknya, lanjutnya, hanya berupaya mengarahkan siswa dan memotivasi supaya siswa-siswa terkait mau rajin berlatih. "Komitmen kami, keberhasilan siswa adalah buah dari kerja keras anak, orangtua, dan guru di sekolah. Kami mengarahkan saja, memberikan motivasi," tuturnya.

Agar usaha memotivasi siswa berhasil, SSC juga memberi kiat khusus, misalnya memberikan soal-soal yang tak diberikan dalam pelajaran kelas tiga tapi ada kecenderungan keluar dalam UMPTN/PSMB. Ada Tim Kaizane SSC yang bertugas membuat soal-soal penuh inovasi bagi peserta bimbel.

◆◆◆

PERKEMBANGAN pesat LBB mulai dari yang kelas gurem hingga papan atas akhir-akhir ini melaju pesat. Ambil contoh SSC dan Primagama. Dari bisnis melayani dan memotivasi anak didik, Primagama yang didirikan 10 Maret 1982 kini sudah memiliki 76 cabang dan 214 *outlet*. Jumlah siswa yang dibimbingnya (dari SD, SLTP hingga SLTA) naik dari 74.000 (tahun 1999/2000) menjadi 83.000 (2000/2001).

SSC yang berpusat di Bandung tak jauh berbeda. Lembaga yang berdiri tahun 1990 tersebut sekarang sudah memiliki 30 cabang dengan puluhan *outlet* di banyak tempat. Jumlah siswa kelas III SMU yang tahun 2001 ikut kursus di Bandung tercatat 6.000, sementara peserta kursus total (hanya SLTP dan SLTA) tahun yang sama mencapai sekitar 24.000 orang.

Cepatnya perkembangan bisnis di bidang yang satu ini tampaknya tak lepas dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan formal (sekolah). Orangtua, terutama, merasa tak puas alias tak "pede" terhadap kemampuan yang dicapai anaknya dari belajar di sekolah. Alhasil, merekalah yang mendorong anak-anaknya masuk LBB. Setidaknya dalam catatan LBB Primagama, orangtua yang merasa berkepentingan terhadap LBB sehingga mereka mendorong anaknya masuk ke sana. Mereka cemas benar, si anak bakal gagal tes masuk jika tak mengikuti pendidikan ala *drill* di LBB.

Padahal di sisi lain, sukses menembus UMPTN/SPMB, menurut Toemin, tak harus ditentukan oleh ikut kursus di LBB. Lebih baik anak-anak itu mempersiapkan diri dengan

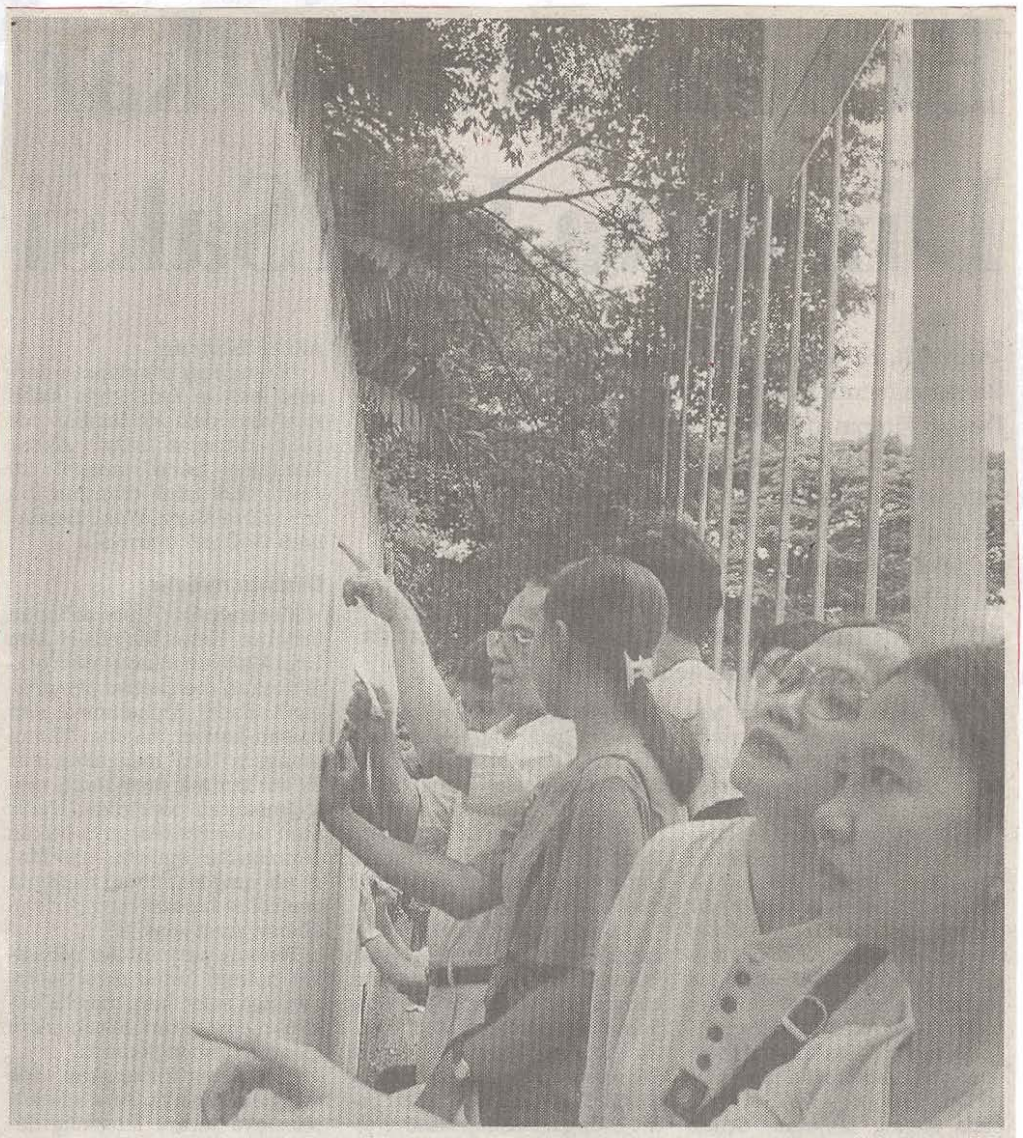
benar sejak masuk SLTA dengan memahami benar pelajarannya. "Kalau ia paham benar terhadap apa yang dipelajari di sekolah ditambah mau belajar kembali secara teratur, tak usah ikut bimbingan belajar juga bisa. Buktinya, anak-anak di daerah yang umumnya tak mampu sehingga jelas tak bisa ikut bimbingan belajar bisa lolos tes UMPTN. Modalnya hanya rajin belajar, paham, dan mengerti pelajaran sebagaimana kurikulum yang berlaku," sarannya.

Bimbingan belajar, lanjut Toemin, hanya dibutuhkan oleh mereka yang malas belajar, tetapi ingin lulus ujian. "Daripada k[redacted]rumah enggak karuan t[redacted]ya, benar belajar atau tidak, lebih baik ia belajar di bimbingan belajar. Ya, saya setuju saja itu, tetapi bagaimana hasilnya...?" papar Toemin tanpa melanjutkan kalimatnya.

Pada pokoknya ia menyatakan, belajar tak bisa dengan cara instan. Apalagi, tujuan tes sebenarnya untuk memprediksi kemampuan calon mahasiswa ketika menempuh [redacted] di perguruan tinggi. Itula[redacted] babnya, di dalam soal jenis IPC (gabungan IPS dan IPA), kemampuan siswa memahami ilmu secara terpadu benar-benar diuji. "Jika ia hanya stan biar sampai mati-matian tak akan bisa memahami ilmunya, karena pemahaman itu terjadi lewat proses pembelajaran," ucap Toemin.

[redacted] sudah, bimbingan belaja[redacted] LBB sebenarnya hanya sa[redacted] untuk mengajak siswa mau belajar keras, namun tanpa ia paham benar ilmunya akan sia-sia. Mau ikut PSMU? Perlu ikut bimbingan b[redacted] atau tidak, keputusannya [redacted] bali kepada kebutuhan masing-masing orang.

(SOELASTRI)



KOMPAS/SOELASTRI IS

Melihat Hasil Ujian —*Beberapa peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN, kini sistem penerimaan mahasiswa baru—SPMB), sedang melihat hasil ujian pada awal Agustus 2001 lalu, yang ditempel di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Sejauh mana hasil bimbingan belajar yang mereka ikuti berpengaruh terhadap kelulusan tes tersebut? Jawabannya memang tidak mudah.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 20 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 4 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : IOIRAWAN, Sarlito.
No_Klass/Subjek : GURU / 370.7

Guru Jadi Presiden?

DALAM bahasa Inggris ada pepatah *"those who cannot do, teach!"*. Maksudnya, tidak semua orang bisa menjadi eksekutif. Sebagian memang ditakdirkan menjadi guru, meski tidak kalah, bahkan mungkin lebih pandai dari eksekutif.

Dalam pewayangan, ada tokoh-tokoh *pandito* bergelar begawan, yaitu para mantan raja atau ksatria yang memilih untuk mengundurkan diri dari kehidupan dunia dan lebih suka bertapa untuk menuntut ilmu yang lebih canggih. Para begawan inilah yang selalu didatangi para ksatria (termasuk raja) jika mereka membutuhkan nasihat tentang suatu persoalan pelik yang sedang dihadapi.

Pemisahan fungsi antara guru dan eksekutif (profesional, birokrat, pemimpin dan sebagainya), juga ada dalam kenyataan hidup sehari-hari. Guru-guru saya semasa SMP dan SMA tetap saja menjadi guru sampai pensiun atau wafat, sementara saya sudah jadi doktor dan profesor. Sebaliknya, sebagian mahasiswa saya sudah ada yang menjadi konglomerat, pejabat, artis atau selebritis kondang, sementara saya tetap jadi profesor (yang artinya guru juga).

◆◆◆

UPAYA untuk memisahkan fungsi guru dari jabatan eksekutif pernah dilakukan Presiden (saat itu) Soeharto, yaitu saat beliau menyatakan ingin *lengser keprabon, madeg pandito*. Artinya, beliau sudah tidak ingin lagi menjadi raja (Jawa: *prabu*, maksudnya: eksekutif, presiden) dan memilih menjadi *pandito* saja, yaitu orang yang dituakan masyarakat karena ilmunya, dan karena itu dijadikan rujukan serta dimintai nasihat para yuniornya. Alasan Soeharto sangat amat sederhana, beliau sudah "TOP", artinya: Tua, Ompong, dan Pikun.

Masalahnya, Harmoko, yang ketua Golkar sekaligus Ketua DPR/MPR saat itu, atas nama rakyat mengimbau dengan beriba-iba agar Pak Harto terus menjadi presiden, karena rakyat masih mempercayainya. Mungkin karena iba, pak Harto menurut dan mau jadi presiden sekali lagi. Akibatnya ternyata fatal. Bukan hanya Pak Harto saja yang digulingkan, tetapi seluruh bangsa ikut terpuruk. Terbukti, guru (*pandito*) dan eksekutif (baca: presiden) tidak dapat disatukan.

KETIKA Abdurrahman Wahid dicalonkan sebagai presiden, tidak ada yang meragukan integritasnya. Beliau seorang intelektual muslim berwawasan luas, demokratis, inklusif, dan selalu keluar dengan ucapan-ucapan pas bagi tiap orang setiap menanggapi situasi bangsa yang pelik. Maka beliau diberi julukan "Guru Bangsa", dan saat beliau akhirnya terpilih menjadi presiden banyak yang memanjatkan puji syukur ke hadirat Illahi, Alhamdulillah ucap yang muslim, Puji Tuhan kata yang lain. Suatu ungkapan perasaan yang amat dapat dimengerti mengingat situasi bangsa yang *chaos* di bawah Presiden Habibie saat itu.

Tetapi kurang dari dua tahun kemudian, si guru bangsa yang dipuja dan disyukuri ini, sudah digoyang. Ternyata ucapan-ucapannya yang dulu dianggap sebagai acuan, saat menjadi presiden justru tidak dapat diterima sebagian elite politik dan sebagian masyarakat. Ucapannya bahwa anggota DPR seperti murid taman kanak-kanak, memicu kemarahan anggota DPR untuk membentuk berbagai Pansus, sehingga akhirnya Wahid dilengserkan dari istana, meski pengadilan belum memvonisnya bersalah dalam kasus Buloggate (bandingkan dengan kasus Akbar Tandjung yang tidak mau mundur meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi).

Demikian pula ucapannya tentang kemungkinan membuka hubungan perdagangan dengan Israel, memicu kemarahan sebagian ulama dan umat. Meski secara akal sehat dan perhitungan ekonomi, sebetulnya tidak ada ruginya berdagang dengan siapa pun, dan meski semua orang tahu, sejak lama, sebelum Wahid dicalonkan menjadi presiden, ia sudah menjadi anggota sebuah yayasan Israel.

Maka tak ayal lagi, si guru bangsa itu digulingkan oleh teman-temannya sendiri yang beberapa saat sebelumnya justru mengagungkan dan mengunggulkannya.

KINI, di era menjelang Pemilu 2004, penyakit yang sama tampaknya akan terulang kembali. Para elite politik, sebagian pakar, dan masyarakat yang sudah pusing memikirkan krisis total yang tak kunjung selesai di republik ini, mulai melirik Nurcholis Madjid. Lagi-lagi, seorang begawan, seorang guru (meski bukan guru sekolah, tetapi guru bangsa), seorang yang jujur, bersih, lurus, dan bebas KKN, serta ucapan-ucapannya selalu menyejukkan, yang patut dijadikan teladan. Tampaknya banyak yang berpikir, jika pemimpinnya (baca: presiden) jujur, maka seluruh birokrasi dan pemerintahan akan berjalan dengan jujur, sehingga NKRI segera akan bisa membebaskan diri dari ajang kehancurannya.

Tetapi jangan lupa, pepatah *"those who cannot do, teach!"* masih berlaku. Artinya, bila kita ulang lagi pengalaman bangsa ini [illegible]gan Soeharto dan Wahid, maka bangsa ini pasti akan kembali terpuruk. Mengapa? Karena fungsi seorang guru memang amat berbeda dari tugas seorang eksekutif (apalagi "presiden").

Salah satu (bukan satu-satunya) fungsi eksekutif yang tidak harus dilakukan seorang guru (termasuk guru bangsa sekali pun) adalah membuat keputusan yang kontroversial untuk langsung dilaksanakan dengan segala konsekuensinya. Seorang presiden, misalnya, harus berani menaikkan harga BBM demi menyelamatkan devisa negara, atau mengeluarkan UU Anti Teroris, meski dituduh anti-HAM, bahkan kalau perlu mengeluarkan perintah berperang guna membela negara. Jika hal-hal seperti ini dilakukan guru bangsa yang menjadi presiden, ia tidak bisa lagi disebut guru, karena guru hanya bicara pada tataran normatif, bukan pada tataran eksekutif.

Oleh karena itu, saya khawatir, bila bangsa ini tidak mau belajar dari pengalaman dan akan mencalonkan Cak Nur, nasib Wahid akan terulang kembali pada diri Cak Nur. Yang lebih mencemaskan lagi, setelah Cak Nur pun kita masih akan mencari guru yang lain, Aa Gym barangkali, dan nasib Aa Gym pun akan sama. Ujung- ujungnya negara kita yang akan porak-poranda. Kapan kita akan bisa belajar dari pengalaman?

SARLITO WIRAWAN SARWONO
Guru besar Psikologi
Universitas Indonesia

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 31 / JANUARI / 2003
Hlm/Kolom : 9 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : TRIMANSYAH, Bambang
Subjek / NO. KLASS : BUKU TEKS / 371. 32

Buku Teks Ala Kurikulum Berbasis Kompetensi

PEMBERLAKUAN kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memang ibarat sebuah garis start bagi dunia pendidikan Indonesia. Pertama, garis start itu menjadi pedoman bagi para pendidik untuk mulai mengujicobakan konsep KBK dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM), terutama mereformasi cara belajar dan mengajar. Kedua, garis start ini berlaku bagi para produsen penyedia sarana utama belajar, yaitu penerbit buku, untuk mulai memproduksi buku dengan konsep baru. Para penerbit kini tengah mereka-reka konsep KBK yang akan disajikannya dalam buku teks atau pelajaran. Ada dua isu yang hendak diangkat, yaitu masalah kompetensi siswa dan *life skills*.

Tidak pelak lagi, penerbit pun berburu mencari penulis andal dan menyiapkan tim redaksi yang berpengalaman. Masalahnya, peralihan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 1994 dan Suplemen GBPP 1999 ke KBK mengandung perbedaan signifikan dibandingkan peralihan GBPP 1984 ke GBPP 1994. Dalam KBK, pembelajaran setiap mata pelajaran dituntut untuk menampilkan realitas keseharian, mempertimbangkan kompetensi siswa, mengakomodasi budaya lokal maupun global, menampilkan fenomena aktual dari setiap perkembangan ilmu, memetakan indikator pencapaian hasil belajar, dan berhubungan dengan keterampilan hidup. Alhasil, konsep buku teks ala KBK benar-benar harus memenuhi konsep pembelajaran multidimensi, bukan sekadar menampilkan materi-materi sesuai dengan KBK, melainkan juga harus memenuhi konsep populer, seperti *how to* (kiat) dan *self-help* (pertolongan mandiri).

Dengan demikian, penulis dan penerbit yang kreatif akan menampilkan buku teks dengan gaya berbeda sesuai dengan pemahaman mereka terhadap penjabaran KBK. Sampai kini pun formula buku berbasis KBK belum banyak diseminarkan ataupun didiskusikan karena mungkin menyangkut rahasia penerbit atau juga karena perlunya pengkajian khusus untuk hal ini. Hal yang lebih banyak menjadi bahan diskusi adalah aplikasi KBK pada setiap mata pelajaran. Padahal, aplikasi KBK pada buku teks juga harus dipetakan mengingat pentingnya posisi buku untuk mendukung suksesnya aplikasi KBK dalam kegiatan belajar-mengajar.



Bambang Trimansyah

Oleh karena itu, pendapat bahwa buku lama masih bisa dipakai untuk KBM dengan KBK rasanya kurang begitu tepat jika melihat perbedaan signifikan dalam penampilan bahan pelajaran. Buku-buku lama mungkin saja mengandung kesalahan konsep, tidak sesuai dengan realitas keseharian, tidak lagi aktual, tidak memberikan pencerahan bagi keterampilan hidup, serta banyak mengandung hal-hal yang menggurui. Jadi, kalau ada kekhawatiran bahwa pergantian kurikulum kali ini juga akan berujung pada pergantian buku pelajaran, prediksi ini kemungkinan besar akan dan harus terjadi.

◆◆◆

KALAU pemerintah peduli terhadap hal ini, kajian aplikasi KBK terhadap penyajian buku teks harus dilaksanakan (bukankah Diknas punya lembaga bernama Pusat Perbukuan?). Kalau pemerintah peduli lagi terhadap konsumen (pelajar), pemerintah harus mengatur pengadaan buku teks oleh pihak swasta dengan menyediakan kertas murah (khusus buku teks), memberi subsidi bagi pengadaan buku teks, dan menunjuk lembaga independen untuk memberikan rekomendasi dan *reward* (tanda bintang) bagi buku-buku yang dinyatakan layak untuk digunakan. Dengan demikian, keterlibatan swasta dalam pengadaan buku teks tidak menjadi salah satu biang kerok tingginya biaya pen- (karena ganti buku) dan kegagalan pendidikan kita karena buku teks yang digunakan a buku teks asal jadi.

Jika benar-benar hendak mengaplikasikan KBK secara benar, kita mungkin tidak menginginkan fenomena lama betapa semua buku teks seolah tampil seragam karena begitu taat terhadap butir-butir pembelajaran pada kurikulum. Akibatnya, begitu gampang untuk memproduksi buku teks, karena, toh, bisa menjiplak buku lain yang telah terbit asal tetap benar-benar mengacu pada kurikulum sampai titik komanya. Sedikit banyak cara ini membuat penulis dan penerbit tidak kreatif, cenderung tidak berpikir, atau malah tidak punya konsep, kecuali membayangkan bisnis yang sangat menggiurkan. Karena itu, tidak usah heran ketika proyek peningkatan buku dan minat baca (PBMB) yang didanai World Bank digelar, banyak penerbit antah-berantah bermunculan. Buku teks pun bisa disiapkan dengan sedemikian cepat karena memang mudah memindahkan butir-butir pembelajaran dari GBPP 1994 ke dalam buku.

Buku teks ala KBK menurut prediksi penulis pastilah akan tampil berbeda-beda, karena mungkin terdapat perbedaan penafsiran terhadap konsep KBK. Dengan konsep KBK ini indikator buku teks berkualitas bisa terlihat jelas. Selain itu, buku teks juga bisa dibagi-bagi berdasarkan kompetensi siswa, yaitu buku teks kompetensi rendah, kompetensi sedang, dan kompetensi tinggi. Dengan demikian, buku teks yang umumnya dipakai di sekolah unggulan Jakarta tidak layak dipakai di Papua ataupun di pedalaman Sumatera. Jadi, kebenaran prediksi ini bisa dibuktikan pada tahun mendatang ketika penerbit mulai dengan start sama. Adanya perubahan berarti ada indikasi kemajuan dunia buku teks kita.

BAMBANG TRIMANSYAH
Praktisi penerbitan dan penulis buku pelajaran

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 2 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 9 / 1-3
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : ANNISAA INSYIAH R
Subjek / CLASS : OTONOMI PENDIDIKAN / 371.32

Otonomi Sekolah dalam Memilih Buku Ajar

OTONOMI PENDIDIKAN

SALAH satu aspek penting dalam kegiatan belajar-mengajar, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, adalah buku ajar atau buku pelajaran. Buku ajar merupakan media pembelajaran yang vital. Kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik jika fasilitas buku ajarnya memadai.

Dalam kegiatan belajar-mengajar, buku ajar sering dianggap sebagai refleksi kurikulum. Hal itu dikarenakan materi yang disusun dalam buku ajar didasarkan pada materi yang terdapat dalam kurikulum. Hal itu sekaligus mengisyaratkan bahwa penggunaan buku ajar merupakan salah satu bentuk penyerapan materi kurikulum.

Bagi siswa, penyerapan materi kurikulum sebenarnya dapat saja dilakukan melalui sumber lain, misalnya, melalui guru. Artinya, tanpa buku ajar pun sebenarnya tidak masalah asalkan guru mampu mentransfer materi kurikulum secara sistematis, terstruktur, dan berkualitas. Namun, hal yang demikian dalam praktik belajar-mengajar tidak pernah terjadi. Yang sering terjadi, guru hanya memberikan tambahan penjelasan berdasarkan apa yang ada dalam buku ajar yang digunakan. Hal itu logis karena, pertama, guru tidak mungkin selalu dapat mempersiapkan diri untuk mengajar semata-mata hanya berdasarkan materi yang tereksplisitkan dalam kurikulum. Kedua, buku ajar yang digunakan diasumsikan telah sejalan dengan kurikulum. Ketiga, penggunaan buku ajar yang ditunjang dengan penjelasan tambahan dan pengayaan dari buku-buku penunjang lazim dalam dunia pendidikan, dan itu dapat dibenarkan.

Kenyataan bahwa dunia pendidikan tidak mungkin tidak menggunakan buku ajar, apalagi kuantitas penggunanya cukup tinggi (di Indonesia jumlah siswa pendidikan dasar hingga pendidikan menengah sekitar 40 juta), sehingga dipandang sebagai segmen pasar yang prospektif oleh praktisi bisnis perbukuan. Hal itu membuat dunia pendidikan menjadi lahan bisnis. Maka, terjadilah kompetisi antar-penerbit yang tidak jarang menjurus pada bentuk kompetisi yang tidak sehat. Dalam situasi semacam ini, buku ajar yang tidak bermutu pun dapat saja digunakan di sekolah-sekolah manakala kompetisi tidak sehat itu terjadi, sementara kontrol pemerintah (baca: Depdiknas) rendah.

Kini pun fenomena itu dapat saja terjadi lagi, apalagi setelah pemilihan buku ajar yang "wajib" dipakai di sekolah-sekolah telah dilimpahkan pada dinas pendidikan di masing-masing daerah, tidak lagi melalui Pusat Perbukuan. Dinas pendidikan kini tinggal memilih buku-buku yang lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Nasional Penilai Buku Pelajaran, seperti terlampir dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah tanggal 22 April 2002. Jadi, dinas pendidikan dalam hal ini sebagai penyeleksi final atas buku-buku ajar yang telah lulus seleksi. Dengan demikian, tugas konkret dinas pendidikan adalah memilih buku ajar terbaik di antara sekian buku ajar yang layak digunakan.

Yang menjadi masalah di sini, pihak dinas pendidikan jelas bukan pakar perbuku-ajaran, di samping bukan praktisi pendidikan. Kekhawatiran yang muncul, mereka salah pilih, dalam arti pilihannya tidak jatuh pada buku yang sebenarnya terbaik. Ini merupakan sesuatu yang dapat terjadi, apalagi mereka tidak di-*back up* oleh para pakar atau praktisi pendidikan yang tahu betul buku ajar yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa. Kekhawatiran itu bertambah lagi, karena kontrol khusus terhadap kemungkinan adanya "komunikasi terselubung" antara pihak dinas pendidikan dan pihak penerbit tertentu tidak dilakukan.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, dan ini sejalan dengan era otonomi sekolah, adalah pada tempatnya bahwa pemilihan buku ajar yang akan digunakan di sekolah dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah selaku manajer sekolah dapat berkoordinasi dengan para guru untuk mempertimbangkan buku-buku yang akan digunakan. Kepala sekolah dan para guru dapat menyusun kriteria tersendiri tentang buku ajar yang akan dipilih, misalnya, dari segi tingkat relevansinya dengan materi kurikulum, kedalaman dan keluasan eksplanasi materi, kesistematisan penguruta materi, kejelasan redaksi bahasanya, dan sebagainya.

Apa pun kriteria yang ditetapkan, yang harus dipedomani pihak sekolah ialah bahwa kriteria itu semata-mata untuk mengutamakan kepentingan siswa pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Di samping itu, pihak sekolah harus menjaga masuknya intervensi kepentingan bisnis, baik yang masuk secara terang-terangan maupun yang samar-samar. Pihak sekolah harus membentengi diri dari kemungkinan masuknya kepentingan lain—apa pun bentuknya—semata-mata demi menjaga kualitas pendidikan.

ANNISSAA INSYIAH R
Mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, STAIN, Malang.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 29 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 9 / I-A
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : KURIKULUM BAHASA INDONESIA / 375

Kurikulum Bahasa Indonesia Sudah Berbasis Kompetensi

JAKARTA, KOMPAS — Pada hakikatnya Kurikulum 1994 untuk Bidang Studi Bahasa Indonesia sudah mencerminkan pendekatan berbasis kompetensi. Melalui pendekatan komunikatif, orientasi pembelajaran bahasa tidak dilihat dari apa yang perlu diajarkan kepada siswa, melainkan bertolak dari pandangan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh siswa.

Demikian pandangan Dr Dendy Sugono, Kepala Pusat Bahasa yang juga dikenal sebagai penulis sejumlah buku ajar Bahasa Indonesia, ketika dimintakan pendapatnya, Rabu (28/8), seputar materi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum terbaru yang kini masih dalam tahap uji coba tersebut semula akan diterapkan pada tahun ajaran 2002/2003, tetapi karena berbagai pertimbangan—termasuk penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat—akhirnya pelaksanaannya ditunda.

"Pada intinya, Kurikulum 1994 itu menuntut keterampilan siswa agar mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar secara tertulis dan lisan. Orientasinya pun tidak pada guru, tetapi lebih tertuju pada siswa," ujarnya.

Dengan demikian, kata Dendy menambahkan, untuk bidang studi Bahasa Indonesia sebetulnya rencana perubahan Kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang diembel-embeli berbasis kompetensi itu tidak perlu merisaukan para guru dan orangtua murid, terutama menyangkut buku ajar. Artinya, kalaupun tahun depan pemerintah memutuskan mulai menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, maka buku ajar Bahasa Indonesia yang mengacu pada Kurikulum 1994 tetap bisa dipakai.

"Penjelasan ini perlu karena saat ini di sekolah-sekolah sudah muncul anggapan bahwa pergantian kurikulum akan dengan sendirinya diikuti penggantian buku ajar," kata Dendy.

Ia mencontohkan, dalam Kurikulum 1994—merupakan pengembangan lebih lanjut dari Kurikulum 1984—ada seperangkat kemampuan yang diharapkan dicapai oleh siswa. Dalam hal komunikasi, misalnya, di sana disebutkan bahwa anak diharapkan bisa mengekspresikan diri, menyampaikan gagasan, dan bisa berpikir logis, sehingga pada gilirannya mereka akan mampu berkomunikasi—baik lisan maupun tulisan—dalam bahasa Indonesia yang cerdas dan cermat.

Berbeda dibandingkan Kurikulum 1984 yang lebih mengedepankan pendekatan pragmatik (sehingga yang diajarkan adalah ilmunya; berkenaan dengan syarat-syarat serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi), pada Kurikulum 1994 yang menggunakan pendekatan komunikatif benar-benar aspek praktisnya yang dimajukan. Hal itu tercermin pada proses pembelajaran, di mana orientasi kurikulum tidak lagi ke guru melainkan pada siswa.

Buku sastra

Menyusul rencana penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang sedang disiapkan Depdiknas, Redaktur Majalah Sastra *Horison*, Moh Wan Anwar, usai acara "Sastrawan Bicara, Siswa Bertanya (SBSB)" di SMU 4 Denpasar hari Senin lalu berharap penyediaan buku sastra wajib baca bagi siswa bisa terealisasi. Hasil pembicaraan dengan Depdiknas sebelumnya, diharapkan bisa disediakan 15 buku sastra wajib baca di SMU.

"Kami sudah mengajukan 25 judul, dan sekarang sedang dalam proses pemilihan 15 judul oleh Depdiknas. Kami gembira Depdiknas bisa menerima usulan program itu," kata Wan Anwar. Dia mengakui ada kendala pada dana. "Masalahnya adalah apakah dananya cukup untuk menyediakan 15 buku tersebut untuk seluruh SMU di Indonesia. Mungkin tidak dalam jangka pendek, namun harus dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Penyediaan buku-buku sastra wajib baca bagi siswa SMU amat dibutuhkan agar siswa mendapat pengalaman membaca, yang diharapkan berlanjut pada pengalaman menulis. (ISW/KEN)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 7 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 9 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : PENDIDIKAN / 379

RUU Sisdiknas

Segera Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sudah menjadwalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada minggu ketiga bulan Maret dan April mendatang. Pengesahannya direncanakan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2003. Namun, secara terpisah, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) menyerahkan naskah RUU Sisdiknas "tandingan" yang mereka susun dan meminta agar pengesahan RUU Sisdiknas ditunda.

Masyarakat dan kalangan pendidikan sudah lama menantikan disahkannya RUU Sisdiknas ini. Hal ini disampaikan Prof Dr Suyanto, anggota panitia kerja RUU Sisdiknas dari wakil pemerintah yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/3).

Dia dimintai tanggapannya tentang keinginan sebagian kelompok untuk menunda pengesahan RUU Sisdiknas.

Suyanto juga pernah menjadi Ketua Komite Reformasi Pendidikan (KRP) Departemen Pendidikan Nasional. KRP ini tugasnya menyiapkan RUU Sisdiknas untuk menggantikan UU No 2/1989 tentang Sisdiknas. Perubahan itu dianggap perlu karena UU Sisdiknas yang ada dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan perubahan zaman. Perubahan penting yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan pelaksanaan otonomi pendidikan dan otonomi daerah. "RUU Sisdiknas sudah terlalu lama dibiarkan dalam ketidakpastian," katanya.

Menurut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta itu, kalau RUU ini tidak segera disahkan, maka dunia pendidikan tidak memiliki pegangan yang pasti. Saat ini, masyarakat pendidikan memang masih berpegang pada UU Sisdiknas No 2/1989, namun mereka juga tahu bahwa UU itu sedang direvisi.

"Jadi, mereka menunggu-nunggu hasil revisi itu untuk sebuah kepastian aturan main pendidikan, dalam situasi otonomi daerah yang masih memerlukan banyak kejelasan," ujarnya.

Saat ini, menurut Suyanto, DPR dan pemerintah sedang bersemangat untuk membahas RUU Sisdiknas dan berharap segera selesai dan bisa diselesaikan sesuai rencana.

Soal roh pendidikan, menurut Suyanto, RUU Sisdiknas sudah memberikan tempat. Pasal 4 RUU Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membentuk manusia berakhlak dan berbudi mulia, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air.

"Saya pikir, draf itu sudah mengandung berbagai filosofi. Sudah ada semangat rekonstruksionisme, konstruktivisme, dan esensialisme. Misalnya dengan membentuk manusia Indonesia yang cerdas," ujarnya.

Pasal 3, menurut Suyanto, juga mengatakan pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak peradaban bangsa yang bermartabat di tengah masyarakat dunia. "Apakah pesan-pesan ini bukan moralitas, apakah bukan roh pendidikan," ujarnya.

Tandingan

Sementara Ketua Umum Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Bruder Heri Bertus, Kamis, menyerahkan naskah RUU Sisdiknas yang disusun MNPK bersama Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia kepada DPR. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari permintaan dua organisasi pengelola pendidikan swasta itu agar pengesahan RUU Sisdiknas ditunda.

Heri Bertus mengharapkan, fraksi di DPR menjadikan masukan MPK dan MNPK untuk merevisi pasal-pasal yang memunculkan rasa diskriminasi. Pada pokoknya, pihaknya berharap agar RUU Sisdiknas mengakomodasi semua materi dan kepentingan masyarakat secara baik dan benar.

"Selain tetap menunjukkan penghormatan dan kemajemukan bangsa Indonesia yang dipersatukan bhinneka tunggal ika, juga asas universalitas di bidang pendidikan," katanya.

(MAM/TRD)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Selasa / 4 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 9 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : TRI
Subjek / NO-CLASS : PERGURUAN TINGGI / 378

PTS Sebaiknya Jadi Badan Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Guna mencegah kemungkinan timbulnya konflik antara eksekutif (pihak rektorat) pada perguruan tinggi swasta (PTS) dengan yayasan pemiliknya, sebaiknya status PTS berubah menjadi badan hukum perguruan tinggi (swasta). Dengan begitu, selain akan memberi peluang yang luas bagi berlangsungnya pola pengaruh klien-organisasi secara proporsional, badan hukum ini juga untuk memenuhi tuntutan otonomi serta efisiensi dari struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mendatang.

Demikian diungkapkan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta E Kusumadmo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (3/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI DPR Taufikurrahman Saleh (Fraksi-Kebangkitan Bangsa).

RDPU kemarin juga dihadiri Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brojonegoro, Ketua Badan Akreditasi Nasional Prof Dr MK Tadjudin, Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Prof Dr Awaloedin Jamin, Rektor Universitas Narotama Surabaya R Djoko Soemadijo. Serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kusumayanto, Pjs Rektor UI Usman Chatib, Rektor Universitas Negeri Semarang Rusdi Kosiswoyo, Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta Sjahrir Ronisef, dan Adil Basuki yang mewakili Rektor Institut Pertanian Bogor.

Usulan perubahan status PTS ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pemberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mulai 6 Agustus mendatang. UU ini memuat perubahan mendasar tentang definisi yayasan dan larangan-larangan terhadap yayasan. Misalnya, kekayaan dari hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dimanfaatkan, dibagikan, dialihkan atau digunakan secara langsung atau tak langsung untuk kepentingan pembina, pengurus, dan pengawas.

Dengan perubahan status tersebut, demikian Kusumadmo, tuntutan klien atas seluruh layanan yang ditawarkan PTS bersangkutan juga dapat secara langsung dipenuhi oleh PTS itu sendiri, mengingat PTS dapat bertindak atas nama hukum. Hubungan PTS dengan pihak sponsor (pemberi bantuan) pun dapat dilakukan secara langsung karena dirinya dapat melakukan transaksi hukum.

Berkaitan dengan usaha agar institusi bersangkutan tetap bisa hidup, menurut Kusumadmo, mau tidak mau PTS harus menjaga mutu lulusannya. Jaminan akan mutu perguruan tinggi menjadi sebuah kemutlakan, sementara struktur organisasi PTS di Indonesia umumnya masih sangat bergantung pada badan penyelenggara (yayasan) dan peran pemerintah.

Terlalu berlebihan

Kusumadmo lebih lanjut mengatakan, kesulitan PTS dalam menjalankan manajemen strategis umumnya berkaitan dengan jasa layanan yang tak berwujud dan sulit diukur, ditambah beban struktur organisasi yang tak efisien karena peran yayasan yang bersifat *redundant* (berlebihan).

"Jika UU yayasan harus dilaksanakan, sifat *redundancy* tersebut akan makin menjadi-jadi. Tiga badan yayasan seperti pembina, pengurus, dan pengawas hanya akan berbenturan dengan fungsi senat akademik, guru besar, serta eksekutif perguruan tinggi," ujarnya. Oleh karena itu, Kusumadmo memperkirakan, di masa mendatang kemungkinan besar bentuk badan hukum yayasan yang menaungi PTS hanya akan menghambat pertumbuhan misi pengajaran, riset, dan layanan yang harus diemban PTS.

Menurut Kusumadmo, otonomi pengelolaan di PTN—setelah adanya PP Nomor 61/1999 tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN)—memberi petunjuk bahwa perguruan tinggi adalah lembaga berbadan hukum. "Otonomi pengelolaan yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi *chain of command* dari struktur organisasi yang ada. Maka, bentuk badan hukum yang akan diberlakukan bagi PTS, seperti tercantum dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional, dirasa sangat tepat untuk mendukung proses otonomi dan efisiensi manajemen PTS," katanya.

Selama ini, tuntutan mahasiswa maupun sponsor, secara langsung harus dihadapi oleh PTS dan bukan oleh badan hukum penyelenggara. Konflik antara yayasan dan pengelola perguruan tinggi dapat saja timbul jika ternyata dalam praktik ternyata kedua institusi tersebut harus berebut peran atau saling menolak peran. "Oleh karena itu, sangat tepat jika PTS juga menjadi badan hukum," demikian E Kusumadmo. (TRI)